



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

JARING PENGAMAN SOSIAL STIMULUS EKONOMI DAMPAK COVID-19

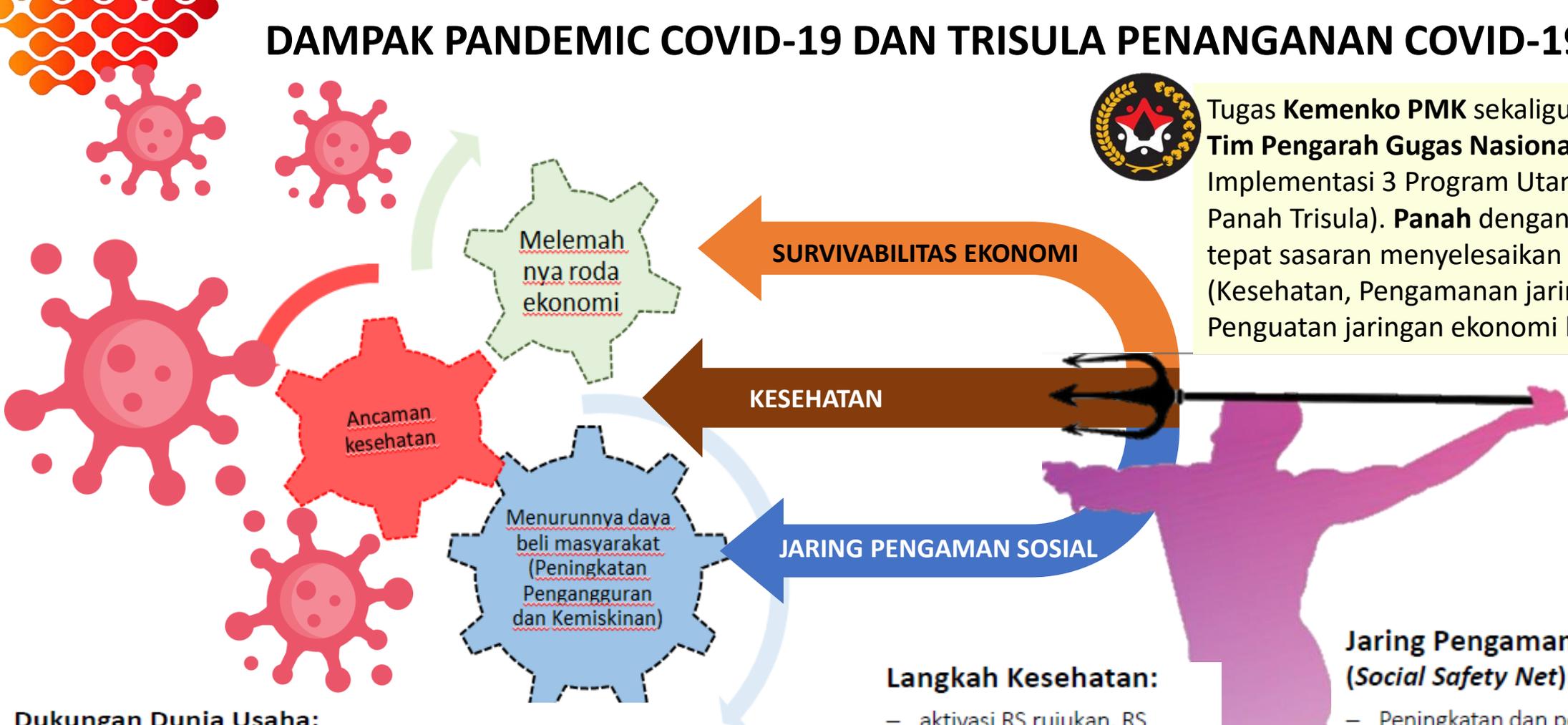
**Oleh :
Herbin Manihuruk
Asdep Kompensasi Sosial**

Jakarta, 17 Juli 2020

DAMPAK PANDEMIC COVID-19 DAN TRISULA PENANGANAN COVID-19



Tugas **Kemenko PMK** sekaligus sebagai **Ketua Tim Pengarah Gugus Nasional** fokus pada Implementasi 3 Program Utama (Program Panah Trisula). **Panah** dengan **3 mata tajam** tepat sasaran menyelesaikan 3 permasalahan (Kesehatan, Pengamanan jaringan sosial, dan Penguatan jaringan ekonomi kecil)



Dukungan Dunia Usaha:

- pengurangan lartas impor termasuk penopang manufaktur, pangan dan kesehatan/medis, percepatan proses ekspor-impor dan peningkatan layanan melalui *National Logistics Ecosystem*
- Berbagai insentif dan relaksasi di bidang perpajakan
- Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menghindari kebangkrutan melalui PMN, penempatan investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan
- Berbagai kebijakan dan relaksasi di sektor keuangan oleh otoritas BI, OJK, LPS, dan Pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan

Langkah Kesehatan:

- aktivasi RS rujukan, RS darurat, dukungan peralatan dan tenaga medis
- pengetesan dan penelusuran
- *physical distancing, work and study from home, etc.*
- Pembatasan Sosial Berskala Besar

Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*):

- Peningkatan dan perluasan PKH
- Peningkatan dan perluasan Kartu Sembako
- Penambahan dan fleksibilitas Kartu Pra-Kerja
- Pembebasan tagihan listrik
- Tambahan bantuan subsidi selisih bunga

ARAHAN PRESIDEN PELAKSANAAN BANSOS DI MASA PANDEMIC COVID-19

Konpres Maret
Hasil Ratas 31 Maret 2020

Konpres Maret 2020 hasil
Ratas 7 April 2020

Ratas PEN
Tanggal 3 Juni 2020

Perluasan Bansos Reguler :

- **Prog Sembako** : 20 juta KPM @RP 200 ribu/bulan
- **PKH** : 10 juta KPM Manfaat naik 25%
- **Tarif diskon listrik** : April-Juni untuk penerima eksisting
- **Kartu Prakerja**

Bansos Non reguler :

- **Banpres** : April-Juni @RP 600 ribu/bulan
- **BST** : April-Juni @RP 600 ribu/bulan

Perpanjangan Bansos :

- **Banpres** : Juli-Des @RP 300 ribu/bulan
- **BST** : Juli-Des @RP 300 ribu/bulan
- **Tarif diskon listrik** : Juli-Sept
- **BLT DD**: Juli-Sept @RP 300 ribu/bulan

JARING PENGAMAN SOSIAL PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

KARTU PRA KERJA



Target 5,6 juta



Rp1 juta untuk biaya pelatihan dan insentif dana Rp600.000/bulan



34 Batch (April - Desember 2020)

BANPRES SEMBAKO JABODETABEK



DKI JKT : 1,3 Juta KK (DTKS & Non DTKS)
Bodetabek : 600 ribu KK (DTKS & Non DTKS)



Bentuk paket sembako
Apr-Jun: Rp 600 ribu ;
Jul-Des : Rp 300 ribu



(April – Des 2020)

BANTUAN SOSIAL TUNAI



9 Juta keluarga dalam DTKS/non DTKS



Bentuk uang tunai
Apr-Jun: Rp 600 ribu ;
Jul-Des : Rp 300 ribu



(April - Des 2020)



12,4 juta KPM



Bentuk uang tunai
Apr-Jun: Rp 600 ribu ;
Jul-Sept : Rp 300 ribu



(April–Sept 2020)

PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL COVID-19



PROGRAM SEMBAKO



15,2 Juta KPM menjadi 20 Juta KPM, yang bersumber dari DTKS



Rp200.000/KPM/Bulan
Hanya dapat membeli bahan pangan sesuai Pedum



(April - Desember 2020)

PROGRAM KELUARGA HARAPAN



Target 9,2 Juta menjadi 10 Juta KPM yang bersumber dari DTKS



Nilai Bantuan sesuai Komponen disalurkan setiap Bulan



(April–Desember 2020)

BANTUAN LISTRIK



Sumber data dari DTKS



seluruh 450 VA diberikan rekening listrik gratis dan untuk 900 VA di DTKS discount 50%.



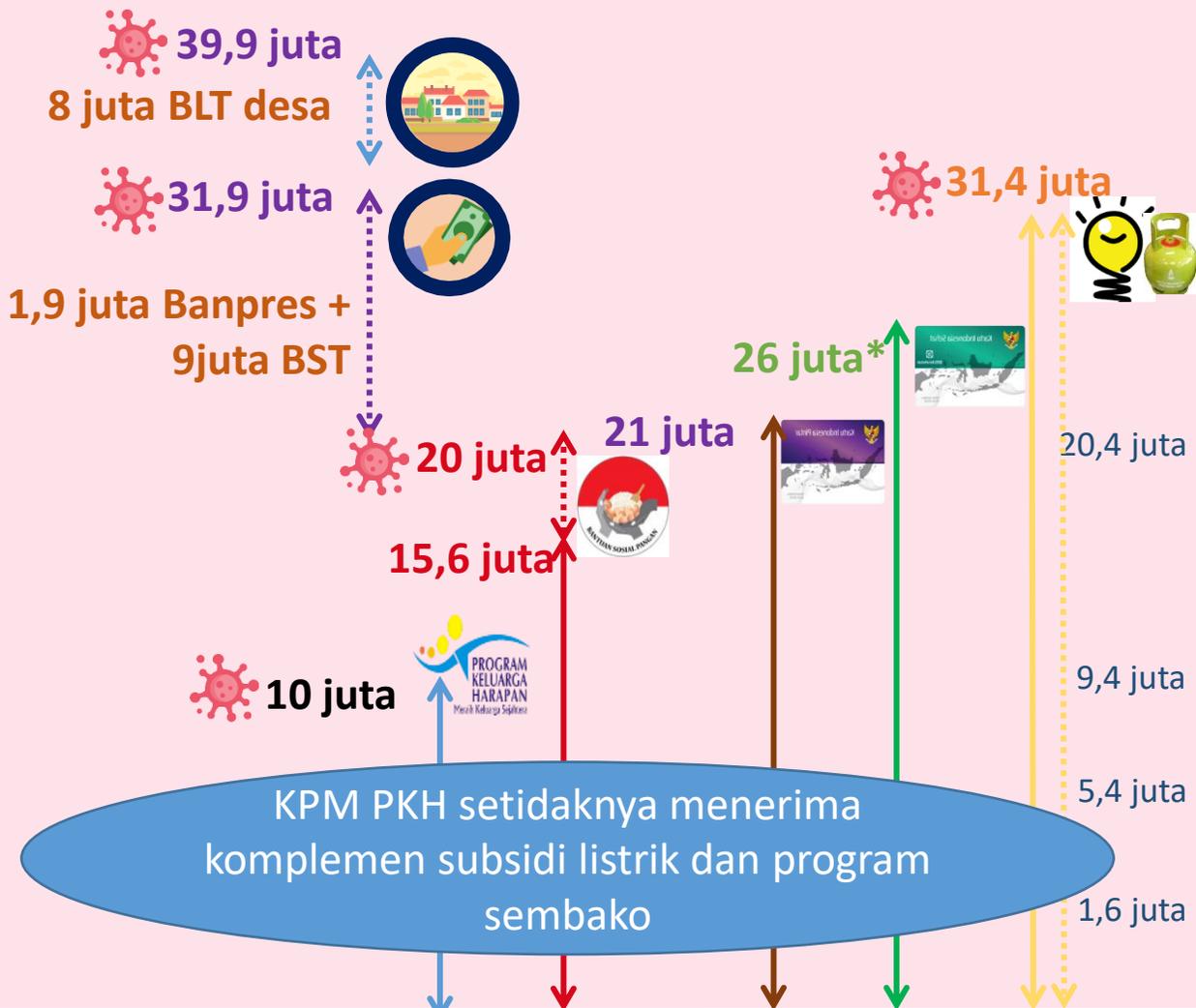
(April–Sept 2020)

Ket:

(Merujuk RATAS PEN 3 JUNI 2020 masa pemberian diperpanjang dengan penyesuaian nilai bantuan)

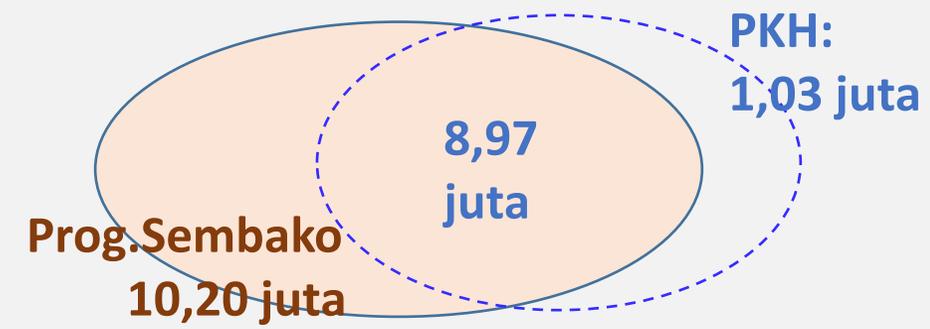
CAKUPAN PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA

 Bansos Covid



CATATAN:

- Jaminan Perlindungan Sosial saat ini mencakup 40 juta keluarga (hampir 60% keluarga di Indonesia)
- KPM PKH 89,7% berkomplemen dengan program sembako.



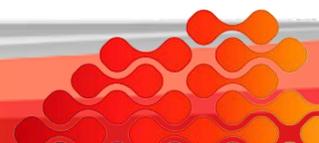
- Nilai bantuan KPM PKH/BPNT
 - KPM PKH murni : Rp 75-900 ribu
 - KPM PKH+P Sembako : RP 275-1,1 juta
 - KPM Prog Sembako murni: Rp 200rb



TANGGAPAN SOROTAN KAJIAN



MASA KAJIAN ADALAH DIKALA :
ADAPTASI AWAL DISEMUA LINI ATAS SITUASI PANDEMIC COVID
ARAHAN PRESIDEN ADALAH MEMPERCEPAT BANSOS DAN
KETEPATAN TENTUNYA MENJADI TARUHAN
LOCAL WISDOM DAN SENSITIFITAS BENCANA YANG
DIMILIKI PARA PELAKU PERLINDUNGAN SOSIAL
SANGAT MENENTUKAN KECEPATAN DAN KUALITAS
KETEPATAN SASARAN



TANGGAPAN SOROTAN KAJIAN



DATA dan KOMPLEMENTARITAS

- Untuk percepatan dan komplemen, KPM PKH perluasan diupayakan adalah pemegang KKS baik dari program sembako dan atau PKH lansia umur 60 plus
- 4,8 juta Program Sembako perluasan dipenuhi dari desil 1 desil 2 dan sebagian provinsi diambil D3
- 50 Kab/Kota yang datanya update berkualitas

VERIFIKASI TIDAK DILAKUKAN SEBAGAIMANA BIASANYA dan KETEPATAN SASARAN

- Belum banyak pengetahuan terkait protokol kesehatan cegah Covid-19 sehingga tidak diambil risiko menerjunkan pendamping pada awal April dan verifikasi menggunakan data yang ada. Selanjutnya, pendamping mendapat PKH perluasan dari Ketua kelompok
- Dalam salur bulan berikutnya, informasi verifikasi terbaru telah dilaporkan dan nilai bantuan KPM bertambah

Lambatnya Perluasan menerima bantuan PKH-PROG SEMBAKO Reguler

- Perubahan Per bulan membutuhkan tambahan anggaran dan penyesuaian sistem.
- Untuk percepatan digunakan anggaran yang tersedia
- 100% KPM PKH eksisting disalurkan 17 April 2020, sementara perluasan salur secara bertahap, data yang siap langsung disalurkan. (2 minggu pasca Arahan Presiden). Tetapi, dalam pemanfaatannya bisa jadi lebih bergantung informasi diterima KPM dan juga jadwal salur melalui komunitas.
- Data PKH dengan syarat komponen sangat dinamis, Namun dipastikan 10 juta KPM PKH pada bulan berikutnya menerima di awal bulan.
- Kelambatan yang wajar?

TANGGAPAN SOROTAN KAJIAN (2)



Pemaketan Program Sembako

- Jenis sembako diutamakan bergizi dan mendukung program berantas stunting
- Pemaketan sangat mungkin terjadi dikarenakan tidak dimilikinya fasilitas penyimpanan makanan baik e warong dan KPM; ketersediaan barang di daerah; preferensi lokal lainnya
- Akan tetapi, sebagian besar Isi paket bahan pangan ditentukan berdasarkan permintaan dari KPM dan disetujui oleh Korda, pendamping PKH, TKSK, dan Dinsos.

Harga barang sembako

Mayoritas KPM Tidak Mengetahui Apakah Harga di E-warong Adalah Harga yang Kompetitif



Dari 664 responden yang diwawancarai, hampir 60% menyatakan tidak mengetahui harga di tempat lain, dan hanya hampir 9% yang menyatakan bahwa harga di e-warong lebih murah.



TANGGAPAN SOROTAN KAJIAN (3)

PELAKSANA SOSIALISASI



TIM PENGENDALI



DINAS SOSIAL/
APARAT DAERAH



- Pendamping PKH
- TSKK
- Koordinator Daerah

PENDAMPING



KELUARGA PENERIMA MANFAAT

	BSNT	Eksisting	Baru
Program Sembako		15,2juta	4,8juta
PKH		9,2juta	800ribu



E-Warung



MATERI

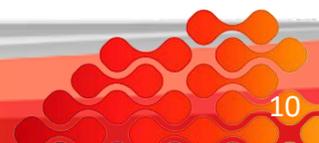
- Kebijakan, Tujuan, Manfaat dan Prinsip Pelaksanaan Program BSNT
- Mekanisme Distribusi Kartu Kombo bagi KPM baru
- Mekanisme Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Non Tunai
- Mekanisme Pengaduan
- Peran Pendamping

- ❑ Dilakukan Tim Pengendali terdiri dari Kemenko PMK, Bappenas, Kemensos, BI, OJK, Himbara, TNP2K, Kemenkeu, dll melalui platformnya melakukan publisitas khususnya untuk Program Sembako dan Program Keluarga Harapan



- *Hasil kajian sangat bermanfaat untuk perbaikan program kedepan. Dalam kajian juga telah tertulis adanya penerapan protokol dan ini info yang membangkitkan optimisme bahwa semua pihak mau beradaptasi*
- *Perlu ditambahkan temuan mengenai pelaksanaan P2K2 jika ada*
- *Pemerintah masih membutuhkan informasi dan rekomendasi bagaimana agar tujuan PKH dalam pengentasan kemiskinan tetap dapat dicapai meski dalam masa pandemic (sistem graduasi dan P2K2 yang adaptif)*

TERIMA KASIH



PROGRAM KELUARGA HARAPAN 2020



ARAHAN PRESIDEN

PKH (Program Keluarga Harapan), jumlah keluarga penerima akan ditingkatkan dari 9,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM. Sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25 persen, misalnya komponen ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini Rp3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp2,4 juta per tahun dan kebijakan ini efektif mulai (bulan) April 2020.

Penyaluran bantuan PKH untuk triwulan II **dipercepat penyalurannya** dan sudah disalurkan pada **15 Maret 2020** dengan jumlah KPM 9,2 juta, anggaran sejumlah 7,01 T

Penggenapan dari 9,2 juta KPM menjadi **10 juta KPM** dilakukan pada bulan **April 2020**. Besaran bantuan meningkat 25%.

Penyaluran bantuan PKH yang semula dilakukan **per triwulan diubah menjadi per bulan** mulai bulan **April-Desember 2020**. Untuk penyaluran bulan April akan diterima pada tanggal 17 dan untuk bulan selanjutnya tiap MII

Kenaikan indeks bantuan PKH sebesar 25%, dengan rincian untuk tiap komponen adalah sbb:

Kategori	Indeks semula (Pertahun)	Indeks (setelah peningkatan)	
		Per tahun	Per bulan
BUMIL	3.000.000	3.750.000	250.000
AUD	3.000.000	3.750.000	250.000
SD	900.000	1.125.000	75.000
SMP	1.500.000	1.875.000	125.000

Kategori	Indeks semula (Pertahun)	Indeks (setelah peningkatan)	
		Per tahun	Per bulan
SMA	2.000.000	2.498.000	166.000
Disabilitas	2.400.000	3.000.000	200.000
Lansia	2.400.000	3.000.000	200.000

PROGRAM SEMBAKO



Arahan Presiden dalam Ratas Antisipasi Dampak Covid-19 31 Maret 2020, penambahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Sembako menjadi 20 juta KPM (semula 15,2 juta KPM) dan indeks bantuan menjadi Rp200 ribu (semula Rp150 ribu), hingga Desember 2020



Data penambahan KPM sebanyak 4,8 juta KPM sudah diberikan kepada Himbara

Bantuan Program Sembako kepada 15,2 juta KPM siap disalurkan tanggal 10 April 2020, sedangkan kepada 4,8 juta KPM tambahan akan disalurkan mulai tanggal 25 April 2020, dan seluruh 20 juta KPM dapat memanfaatkan bantuan berikutnya tanggal 10 setiap bulannya

BANTUAN SOSIAL PROGRAM SEMBAKO BERTAMBAH

SEMULA  **MENJADI**
Rp150.000 → **Rp200.000**
HINGGA BULAN DESEMBER 2020

JENIS BAHAN PANGAN



Sumber Karbohidrat
Beras
Jagung
Sagu



Sumber Protein Nabati
Kacang-kacangan
Tempe
Tahu



Sumber Protein Hewani
Telur
Daging Ayam
Daging Sapi
Ikan Segar



Sumber Vitamin dan Mineral
Sayur-mayur
Buah-buahan

#KEMENSOS
Hadir

BNI

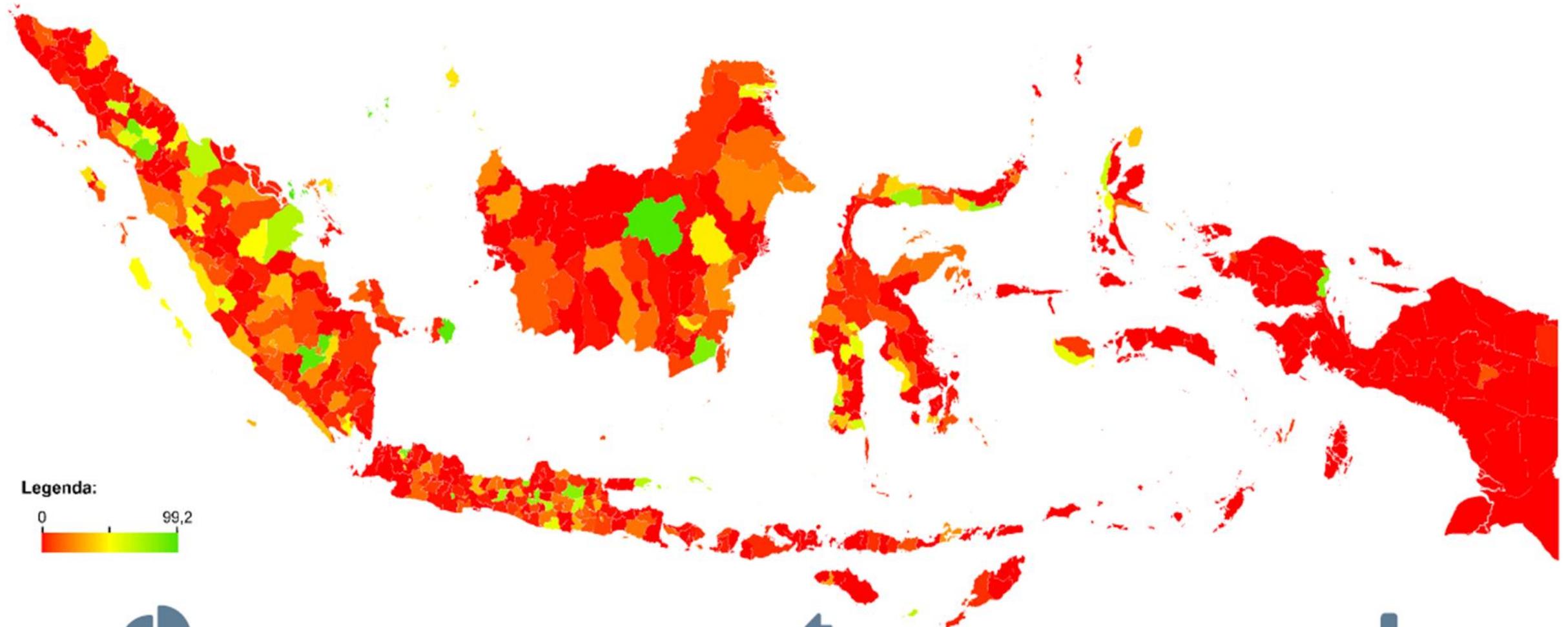
BANK BRI

mandiri

Bank BTN



KEAKTIFAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)



Legenda:



Hanya 50 daerah yang melakukan perbaikan data di atas 50%



Daerah yang memperbaiki DTKS tertinggi adalah Kota Jakpus, Kota Padang Panjang, dan Karimun



Pada periode 2017-2019 daerah yang memperbaiki DTKS mengalami penurunan jumlah penduduk miskin